

**PENDATAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**LAPORAN MAGANG**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**Dinda Candra Pinastika**

**1120 31525**

**PROGRAM STUDI AKUNTASI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2024**

# LEMBAR PENGESAHAN

## TUGAS AKHIR

### LAPORAN MAGANG PENDATAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA

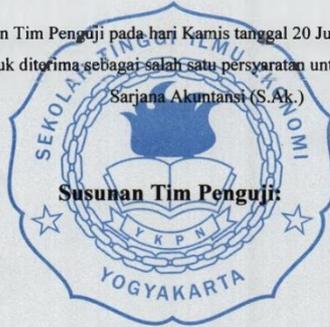
Dipersiapkan dan disusun oleh:

**DINDA CANDRA PINASTIKA**

**Nomor Induk Mahasiswa: 112031525**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



#### Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Soegiharto, Dr., M.Acc., Ak., CA.

Penguji

Rudy Badrudin, Dr., M.Si.

Yogyakarta, 20 Juni 2024  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Laporan magang ini menjelaskan aktivitas yang dilakukan penulis selama magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, serta menguraikan pendataan pajak reklame di Kota Surakarta dari pemasangan reklame, aktor terkait hingga realisasi pajaknya. Data realisasi pajak yang diuraikan merupakan data dari laporan realisasi pajak reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada tahun 2020 sampai 2023. Kesimpulan yang diperoleh dari data realisasi pajak reklame di Kota Surakarta adalah tiap tahunnya konsisten mengalami tren peningkatan pendapatan, walaupun pada tahun 2022 dan 2023 realisasi pajak reklame tidak melampaui target yang ditentukan. Pendapatan pajak reklame tetap menunjukkan peningkatan, mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam pengelolaan pajak reklame untuk mendukung pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan sektor pajak reklame efektif dalam mengelola dan berpotensi besar dalam peningkatan pajak daerah.

Kata kunci: pajak daerah, pajak reklame, pendapatan daerah, peningkatan pendapatan daerah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Latar Belakang

Pada era kemajuan teknologi dan transformasi digital saat ini, pemerintahan daerah di Indonesia semakin memperhatikan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini juga tercermin dalam upaya Pemerintah Kota Surakarta yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta dalam menjalankan tugasnya terkait pendataan dan pemungutan pajak serta retribusi.

Magang ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam dunia nyata. Dengan berada di lingkungan Bapenda, Penulis dapat belajar tentang proses pendataan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, juga dapat memahami bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pajak dan retribusi di daerah.

Penulis tertarik untuk mengambil topik pendataan pajak reklame sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Surakarta. Meskipun kontribusi pajak reklame terhadap total pendapatan pajak tidak sebesar pajak lainnya, proses dan prosedurnya sangat menarik bagi penulis. Selain itu, data realisasi pajak reklame di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang menjadi alasan tambahan bagi penulis untuk memfokuskan studi magang penulis di bidang ini.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Tujuan Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta penulis memiliki tujuan agar:

1. Mampu memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh pada mata kuliah Perpajakan 1 mengenai Pendapatan Daerah, khususnya terkait pajak reklame sebagai salah satu sektor penyumbang peningkatan pendapatan daerah kota Surakarta.
2. Memahami relasi antar institusi yang berkepentingan terkait perizinan pemasangan reklame sebagai salah satu pendapatan daerah di kota Surakarta.
3. Meningkatkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan terkait perizinan pemasangan reklame di Kota Surakarta.

## Manfaat Magang

Kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
  - a. Mendapat pengalaman langsung dalam proses pengelolaan keuangan pendapatan daerah seperti pemungutan pajak, pendataan transaksi dan pelaporan keuangan.
  - b. Mengembangkan keterampilan kerja tim dan komunikasi yang penting dalam lingkungan kerja profesional.
  - c. Meningkatkan literasi tentang perpajakan dan pendapatan daerah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- d. Memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional dengan para praktisi dan profesional di bidang pajak dan pendapatan daerah.
2. Manfaat bagi STIE YKPN Yogyakarta
  - a. Menjalin Kerjasama yang baik antara STIE YKPN Yogyakarta dengan Bapenda Kota Surakarta.
  - b. Memberikan umpan balik berharga bagi STIE YKPN Yogyakarta tentang relevansi kurikulum STIE YKPN Yogyakarta dengan kebutuhan industri keuangan publik
3. Manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
  - a. Bapenda dapat terbantu menyelesaikan pekerjaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi.
  - b. Bapenda dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitasnya dengan adanya kegiatan magang.

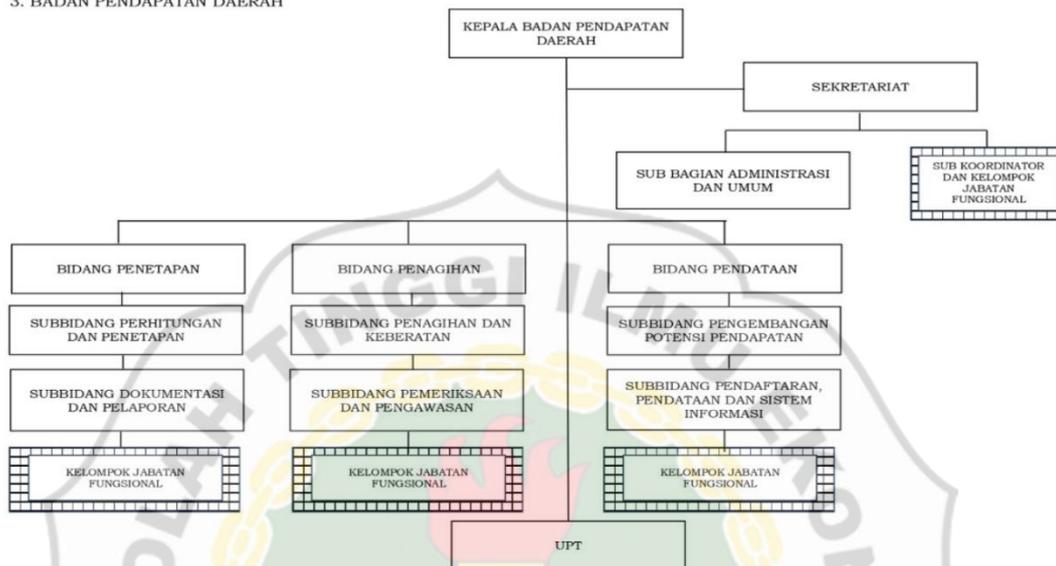
## **Profil Organisasi BAPENDA Surakarta**

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi magang karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh STIE YKPN YOGYAKARTA. Organisasi atau instansi pemerintah yang disebut Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta bertugas mengatur kebijakan daerah mengenai pengelolaan pajak daerah dan pendapatan kompensasi daerah di Kota Surakarta.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Struktur Organisasi dan Tugas Karyawan

### 3. BADAN PENDAPATAN DAERAH



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta**

Sumber: <https://bapenda.surakarta.go.id/struktur-organisasi/>

## Aktivitas Magang

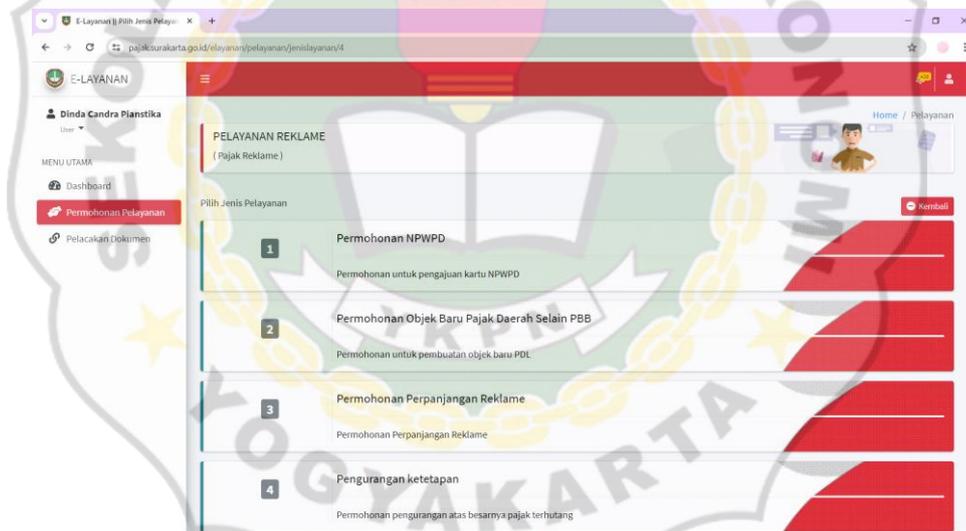
### 1. Menginput dan Mengunggah Permohonan Pajak Reklame pada Sistem E-Layanan

Pajak reklame merupakan beban/biaya yang harus dibayar agar bisa mendapatkan izin dalam penyelenggaraan reklame. Penulis melakukan agenda pajak reklame yaitu permohonan NPWPD pribadi dan badan, permohonan objek baru reklame, dan permohonan perpajakan reklame melalui sistem e-layanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. E-layanan pajak kota Surakarta merupakan platform digital yang disediakan oleh pemerintah kota Surakarta untuk memudahkan warga dalam melakukan berbagai transaksi perpajakan secara *online*. Agenda reklame menginput dan mengunggah di sistem e-layanan seharusnya dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, tapi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan kondisi dimana wajib pajak reklame masih pasif menyebabkan petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang membantu untuk menginput data terkait permohonan NPWPD pribadi dan badan, permohonan objek baru reklame, dan permohonan perpanjangan reklame. Setelah melakukan agenda pajak reklame, tahap selanjutnya merekap data perpanjangan tersebut ke dalam microsoft *spreadsheet* secara urut sesuai dengan nomor pelayanan.

Berikut tampilan pada Sistem E-Layanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, dan perekapannya:



**Gambar 2.2 Tampilan Jenis Layanan Pajak Reklame E-Layanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FORM PERMOHONAN PERPANJANGAN REKLAME REKLAME  
Isilah data dengan teliti dan benar.

Data Pemohon

Data diisi sesuai dengan data KTP

Nomor Induk Kependudukan (NIK)\*

Nama \*

Jalan \*

RT \*

RW \*

Kelurahan \*

Kecamatan \*

Kabupaten/Kota \*

Kode Pos

Email

No. HP

**Gambar 2.3 Tampilan Form Permohonan Pajak Reklame E-Layanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta**

Data Pengajuan  
\* Nomor Pelayanan akan muncul setelah melakukan pengajuan

No	No Pelayanan	Nama Pemohon	Jenis Pajak	Jenis Layanan	Tanggal	Status	Keterangan	Action
1	04.2024.001002	ANDREAS DRAJAD WIDHIARSA	Reklame	Permohonan NPWPD	23-04-2024	Diterima		Tunda Diterima Lihat Data
2	04.2024.001001	BATAK KRISNA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
3	04.2024.001000	TOKO GAYA BARU	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
4	04.2024.000999	PT DAVIA INDAH YASA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
5	04.2024.000998	PT DAVIA INDAH YASA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
6	04.2024.000997	PT DAVIA INDAH YASA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
7	04.2024.000996	PT DAVIA INDAH YASA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
8	04.2024.000995	PT DAVIA INDAH YASA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
9	04.2024.000994	PTEPSON INDONESIA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data
10	04.2024.000993	PTEPSON INDONESIA	Reklame	Permohonan Perpanjangan Reklame	23-04-2024	Proses		Lihat Lihat Data Lihat Data

**Gambar 2.4 Tampilan Nomor Pelayanan Pajak Reklame E-Layanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 2. Memisahkan dan Merekap Berkas Permohonan NOP Baru, Mutasi dan Pembedulan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak. Penulis melakukan pemisahan berkas permohonan NOP baru, permohonan mutasi/perubahan subjek dan objek pajak (pecah/gabung), dan permohonan pembedulan subjek dan objek pajak pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah memisahkan berkas, penulis mengecek perubahan yang ada pada berkas permohonan dengan dokumen SPPT, yaitu mengecek perbedaan data yang tertera pada surat pemberitahuan objek pajak dan sertifikat tanah dengan SPPT induk, lalu tahap selanjutnya merekap data perubahan tersebut kedalam *spreadsheet* (Gambar 2.9) sesuai permohonan/ perubahan yang diajukan dalam berkas permohonan tersebut. Adapun cara merekap berkas permohonan ke *spreadsheets*:

### 1) NOP baru

NOP atau Nomor Objek Pajak adalah kode identifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah objek pajak, seperti properti atau tanah.

### 2) Pembedulan PBB-P2

### 3) Mutasi (pecah/gabung)

Berikut tampilan berkas permohonan SPPT PBB-P2 dan perekapannya:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. NO TRANSAKSI  
2. NOP  
3. NOPSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL  
5. NIPWP

B. DATA SUBJEK PAJAK

6. STATUS  
7. PEKERJAAN  
8. NAMA SUBJEK PAJAK  
9. NAMA JALAN  
10. NO TELP  
11. KELURAHAN / DESA  
12. RT / RW  
13. KODE POS  
14. RT  
15. RW  
16. KODE KOTA  
17. NOMOR KTP / NIK

C. DATA LETAK OBJEK PAJAK

18. NAMA JALAN  
19. NO PERSEK  
20. BLOK / KAW. / NOMOR  
21. KELURAHAN / DESA  
22. RT / RW

D. DATA TANAH

23. LUAS TANAH (M<sup>2</sup>)  
24. ZONANILAI TANAH

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

Gambar 2.5 Berkas Surat Pemberitahuan Objek Pajak

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA

0078340

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2024 PERKOTAAN SURABAYA

LETAH OBJEK PAJAK

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp)	TGN NJOP (Rp)
BUMI	130	059	1.862.000	242.060.000
BANGUNAN	120	027	429.000	51.480.000

NJOP Sisa yang dasar pengisian PBB: 283.540.000  
NJOP TPT (NJOP Tidak Sisa Pajak): 10.000.000  
NJOP untuk pengisian PBB P2: 283.540.000  
PBB P2 yang Terutang: 283.540

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)  
DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH

INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	BURGACENGA	KEMUNGKINAN PEMBAYARAN

QR CODE  
AKSES PEMBAYARAN QRIS

Catatan: Pajak terutang diberikan harga sebesar 2% setelah, sehingga total harus dibayar RpPT.

TOL JATUH TELPO  
TEMPAT PEMBAYARAN: 30 SEP 2024

SURAKARTA 02 JAN 2024

BANK JATENG, QRIS, BNI, MANDIRI, BCA, BJB  
STN, PT. POS, TUNGGAL, LINDA, KALIA  
BUNGALAPAK, SHOPPE, INDOMART, AL FARMAT

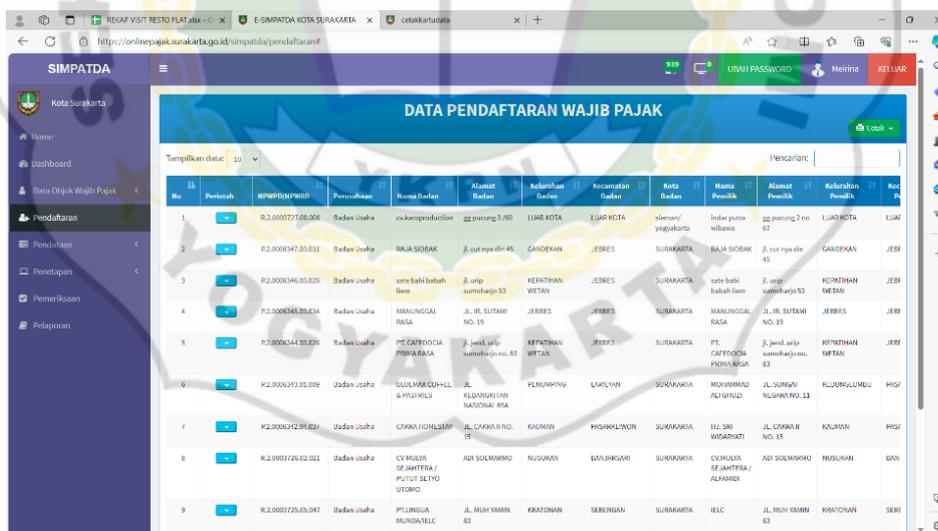
TULUS WIDAJAT, SE, M.Si.  
NREK: 397204071997031005

Gambar 2.6 Berkas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 3. Mencatat dan Menghitung Realisasi Observasi Visit Pajak Resto Daerah

SIMPATDA merupakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang dibuat agar memudahkan petugas pajak serta masyarakat guna mengecek data perpajakan. Kegiatan mencatat realisasi pajak melalui sistem SIMPATDA yang terdapat daftar data Wajib Pajak seperti pada gambar 2.10 dengan mencetak kartu data yang tertera pada gambar 2.11, realisasi pajak dapat dihitung dengan mengecek nominal pajak dan pajak dibayar di kartu pajak sesuai dengan gambar 2.12. Tahap selanjutnya mencatat data tersebut dan menghitung jumlah realisasi pada *spreadsheet*, sesuai dengan tampilan 2.13. Berikut tampilan SIMPATDA Kota Surakarta dan rekapannya:



The screenshot displays the SIMPATDA web application interface. The main content area shows a table titled "DATA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK". The table lists various tax registrants with columns for ID, Name, Address, and other details. The interface includes a sidebar with navigation options like "Home", "Dashboard", "Data Objek Wajib Pajak", "Pendaftaran", "Pendaftaran", "Penetapan", "Pemeriksaan", and "Pelaporan".

No	Perikab	NPWP/DIRP/PT/PTD	Perusahaan	Nama Daftaran	Alamat Daftaran	Kelurahan Daftaran	Kecamatan Daftaran	Kota Daftaran	Nama Pemilik	Alamat Pemilik	Kelurahan Pemilik	Kota Pemilik
1		R2.0003727.08.000	Badan Usaha	cv-kemproduction	gg pingung 3/80	LUAR KOTA	LUAR KOTA	Surakarta	Indah putra Wibawa	gg pingung 2 no 67	LUAR KOTA	LUAR KOTA
2		R2.0006947.05.031	Badan Usaha	BAJA SIOBAK	Jl. cut nya din 45	GANDEKAN	JEBRES	SURAKARTA	BAJA SIOBAK	Jl. cut nya din 45	GANDEKAN	JEBRES
3		R2.0006946.03.026	Badan Usaha	sate babi babah Bani	Jl. urip sumbarjo 53	KEPATIHAN WETAN	JEBRES	SURAKARTA	sate babi babah Bani	Jl. urip sumbarjo 53	KEPATIHAN WETAN	JEBRES
4		R2.0006948.08.034	Badan Usaha	MANUNGKAL RASA	Jl. IR. SUTAMI NO. 19	JEBRES	JEBRES	SURAKARTA	MANUNGKAL RASA	Jl. IR. SUTAMI NO. 19	JEBRES	JEBRES
5		R2.0006944.08.026	Badan Usaha	PE CAFFEDOCIA PRIMA RASA	Jl. Jend. urip sumbarjo no. 83	KEPATIHAN WETAN	JEBRES	SURAKARTA	PE CAFFEDOCIA PRIMA RASA	Jl. Jend. urip sumbarjo no. 83	KEPATIHAN WETAN	JEBRES
6		R2.0006943.01.059	Badan Usaha	EGULUM.COM-LL 6-PIJU MILI 2	JL. KILANGKUNJANG NASIONAL RTA	PENURIPING	LAMPUN	SURABAYA	MUHAMMAD ALI GIBUZI	JL. SURON NGUNAN NO. 11	KULONLUWU	PIJIS
7		R2.0006942.06.031	Badan Usaha	CVRVA HONESTY	JL. CAKRA II NO. 15	KALIMATI	PISIRALWON	SURABAYA	ILL. SRI WIDAYATI	JL. CAKRA II NO. 15	KALIMATI	PIJIS
8		R2.0003726.02.021	Badan Usaha	CV MULYA SEJAHTERA / PUSUT SRI NYO UTOMO	ADI SOEMARNO	NUSURAN	BAJANGKARI	SURABAYA	CV MULYA SEJAHTERA / JALAN HADI	ADI SOEMARNO	BRUSUKAN	SIAM
9		R2.0003725.05.047	Badan Usaha	PTLINGUA MUNDATELC	JL. MUH YAMIN 83	KRATONAN	SEBELANGAN	SURABAYA	ELIC	JL. MUH YAMIN 83	KEPATIHAN WETAN	SIAM

Gambar 2.7 Tampilan Daftar Pendaftaran Wajib Pajak SIMPATDA Kota Surakarta.

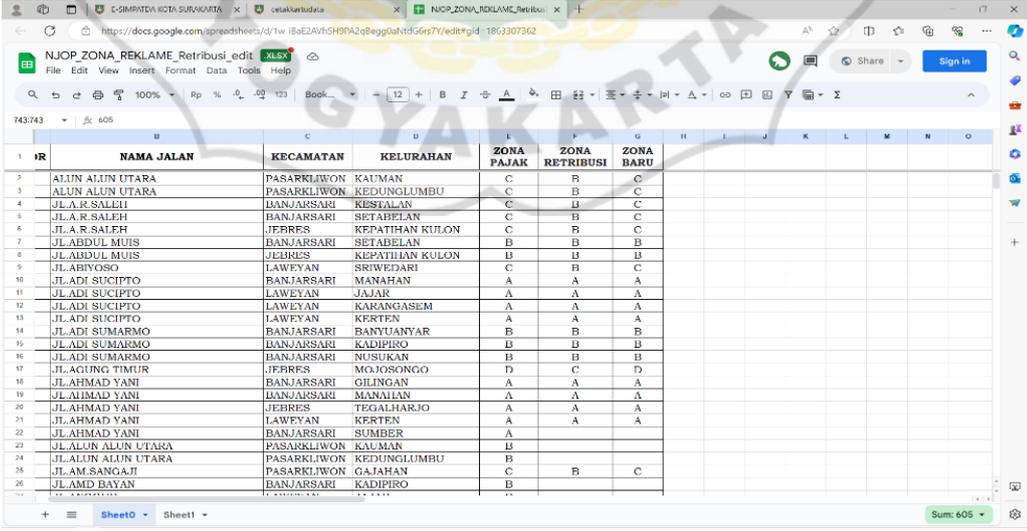


# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

observasi tersebut juga diperlukan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh restoran tersebut. Ini termasuk pengumpulan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas keuangan lainnya.

## 5. Mengedit Data NJOP Zona Reklame Retribusi

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak tertentu, termasuk zona reklame. Retribusi zona reklame adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik reklame untuk penggunaan lahan atau fasilitas tertentu yang digunakan untuk pemasangan reklame. Penulis mengedit data NJOP Zona Reklame Retribusi dengan menambahkan data data baru melalui *spreadsheet*. Dalam menambahkan data baru penulis juga menginput zona pajak, zona retribusi serta zona baru berdasarkan data nama jalan, kecamatan dan kelurahan. Berikut tampilan rekapan edit data melalui *spreadsheet*:



IR	NAMA JALAN	KECAMATAN	KELURAHAN	ZONA PAJAK	ZONA RETRIBUSI	ZONA BARU
2	ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KAUMAN	C	B	C
3	ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C	B	C
4	JL.A.R.SALEH	BANJARSARI	KESITALAN	C	B	C
5	JL.A.R.SALEH	BANJARSARI	SETABELAN	C	B	C
6	JL.A.R.SALEH	JERRES	KEPATIHAN KULON	C	B	C
7	JL.ABDUL MUIS	BANJARSARI	SETABELAN	B	B	B
8	JL.ABDUL MUIS	JERRES	KEPATIHAN KULON	B	B	B
9	JL.ABYOSO	LAWEYAN	SREWEDARI	C	B	C
10	JL.ADI SUCIPTO	BANJARSARI	MANAHAN	A	A	A
11	JL.ADI SUCIPTO	LAWEYAN	JAJAR	A	A	A
12	JL.ADI SUCIPTO	LAWEYAN	KARANGASEM	A	A	A
13	JL.ADI SUCIPTO	LAWEYAN	KERTEN	A	A	A
14	JL.ADI SUMARMO	BANJARSARI	BANYUANYAR	B	B	B
15	JL.ADI SUMARMO	BANJARSARI	KADIPIRO	B	B	B
16	JL.ADI SUMARMO	BANJARSARI	NUSUKAN	B	B	B
17	JL.AGUNG TIMUR	JERRES	MOJOSONGO	D	C	D
18	JL.AHMAD YANI	BANJARSARI	GILINGAN	A	A	A
19	JL.AHMAD YANI	BANJARSARI	MANAHAN	A	A	A
20	JL.AHMAD YANI	JERRES	TEGALHARJO	A	A	A
21	JL.AHMAD YANI	LAWEYAN	KERTEN	A	A	A
22	JL.AHMAD YANI	BANJARSARI	SUMBER	A	A	A
23	JL.ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KAUMAN	B		
24	JL.ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B		
25	JL.AM.SANGAJI	PASARKLIWON	GAJAHAN	C	B	C
26	JL.AMD BAYAN	BANJARSARI	KADIPIRO	B		

Gambar 2.10 Tampilan Rekapan Edit Data Melalui *Spreadsheet*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 6. Merekap ULAS Pengaduan Bapenda

Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) adalah sebuah wadah atau mekanisme yang disediakan oleh pemerintah kota Surakarta sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pengaduan terkait berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, atau masalah-masalah lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. ULAS bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kota dan memberikan umpan balik kepada pemerintah terkait kinerja dan layanan yang diberikan. Berikut tampilan rekapan ULAS pengaduan Bapenda Kota Surakarta:

No.	Nama Pengadu	Media Pengadu	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau lama penyelesaian pengaduan
286	Perwakilan Warga	ULAS	Lapor Mas Wali: perwakilan warga Sabrang Lor: Pak mau tanya, ini saya sudah WA ke bapenda gak dijawab? Apakah hasil print Surat Keterangan PBB 10 Tahun dari onlinepajak.surakarta.go.id sah dan bisa untuk syarat mengurus balik nama sertifikat tanah? <a href="https://onlinepajak.surakarta.go.id/pajak/fbb10th.eb7e-bd-0&amp;ebp-10&amp;ebz-2_1701306114379">https://onlinepajak.surakarta.go.id/pajak/fbb10th.eb7e-bd-0&amp;ebp-10&amp;ebz-2_1701306114379</a>	30/11/2023	Selamat pagi dan salam sehat bagai/bu. Untuk SK PBB Lunas 10 tahun dari BAPENDA sah dan bisa dipertanggungjawabkan datanya, namun untuk pengurusan sertifikat perlu stempel basah dari BAPENDA. Silahkan tindak ke kantor. Terimakasih	01/12/2023	1 hari
287	Perwakilan Warga	ULAS	Lapor Mas Wali: perwakilan warga Sabrang Lor: Pak mau tanya, ini saya sudah WA ke bapenda gak dijawab? Apakah hasil print Surat Keterangan PBB 10 Tahun dari onlinepajak.surakarta.go.id sah dan bisa untuk syarat mengurus balik nama sertifikat tanah? <a href="https://onlinepajak.surakarta.go.id/pajak/fbb10th.eb7e-bd-0&amp;ebp-10&amp;ebz-2_1701306114379">https://onlinepajak.surakarta.go.id/pajak/fbb10th.eb7e-bd-0&amp;ebp-10&amp;ebz-2_1701306114379</a>	01/12/2023	Selamat pagi dan salam sehat bagai/bu. Untuk SK PBB Lunas 10 tahun dari BAPENDA sah dan bisa dipertanggungjawabkan datanya, namun untuk pengurusan sertifikat perlu stempel basah dari BAPENDA. Silahkan tindak ke kantor. Terimakasih	01/12/2023	1 hari
288	Ilkham	ULAS	Pengajuan validasi pajak terlalu lama, padahal dibutuhkan untuk akad, karena salah satu pihak harus dinas ke luar negeri.	05/12/2023	Selamat sore dan salam sehat Sdr Ilkham. Terkait permohonan Sdr mohon untuk menginformasikan NOP dan nomor agar dapat kami proses. Terimakasih	05/12/2023	1 hari
289	***** (penaritenar@app.com, *****)	ULAS	Lapor Mas Wali: *****. Halo mas wali, selamat pagi. Mas wali, saya mau ngadu nih. Sebelumnya saya merupakan anak pedagang mie ayam, yang punya keperluan untuk klarifikasi pajak di bapenda solo atau bpkpd. Saya sudah datang pagi jam 8.30 tapi sedihnya dan lansun ke loket klarifikasi, dan outetuasnya bilane	12/12/2023	Selamat sore sdr/*****Menjawab laporan sdr/! pada tgl 12 Des 2023 pukul 13.14:46, akan kami evaluasi lebih lanjut terkait jam pelayanan klarifikasi pajak BPHTB. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	12/12/2023	1 hari

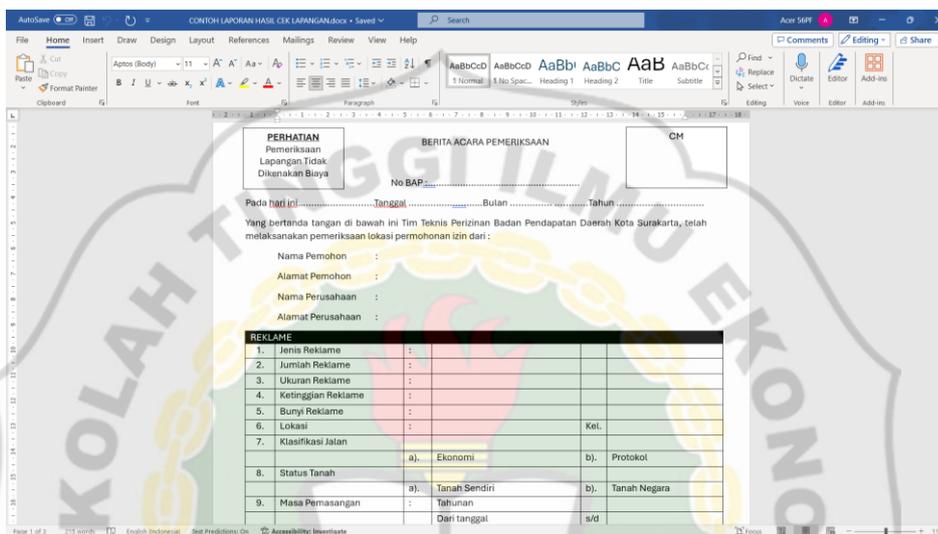
Gambar 2.11 Tampilan Rekapan ULAS Pengaduan BAPENDA Kota

Surakarta

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 7. Membuat dan Menyalin Dokumen Resmi: Berita Acara, Laporan dan Rekapitulasi

- 1) Membuat dan mengkopi dokumen Berita Acara



Gambar 2.12 Tampilan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Laporan Cek Lapangan Reklame.

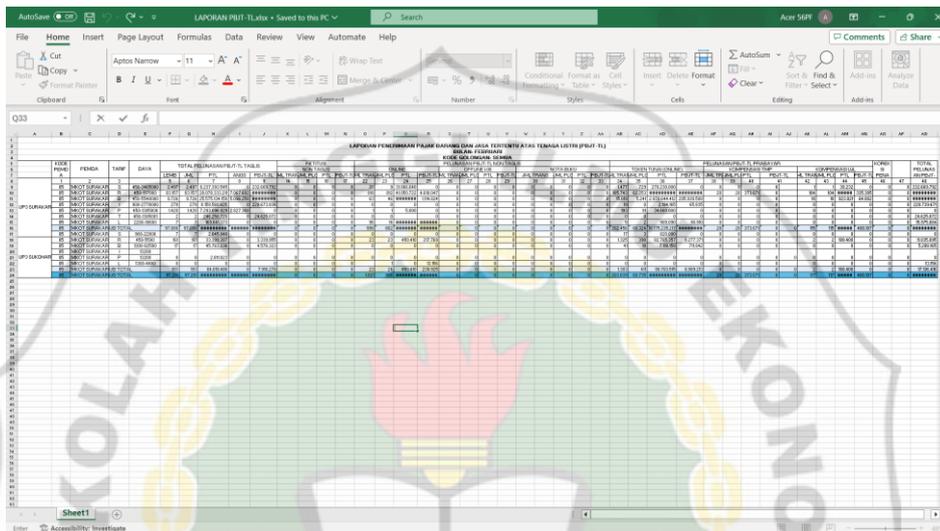
- 2) Menyalin Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor

NO	KETERANGAN	JENIS																JML									
		A1	A2	A4	B1	B4	C1	C2	C4	D1	D2	D4	E1	E2	E4	F1	F2		F4	G1	G2	G4	H1	H2	H4	I1	I2
1	TAHUN LALU 2022	8.976	97	46	5.816	16	59.580	543	446	623	217	58	130	615	6	15.900	18	178	5.068	185	99	899	267	11	599	3	
2	BARU/BNY	36			108	1	2.141	44	15	18	2	1	2	5		251	3	9	61	43	99	8	20	1	21		
3	MUTASI MASUK	115					1.407			3	20			1		115			67	2		20	2			12	
4	MUTASI MASUK DLM PROV.	65			78	1	687	1		1	10					64			38			9			2		
5	JML BERTAMBAH	9.192	97	46	6.151	18	61.815	588	465	671	219	60	132	621	6	16.330	21	187	5.234	230	99	936	289	12	634	0	
6	MUTASI KELUAR																										
7	ANTAR PROV.	59			92	1	470	2		11	4	1		18		50			38	1		3	1		1		
8	MUTASI KELUAR SLM PROV.	151	4		135		3.555	12	7	11	1			13		90			26	1		4	7		3		
9	HAPUS REGIDENT	210	4	0	237	1	2.023	14	7	22	5	1	0	33	0	140	0	0	64	2	0	7	8	0	4	0	
10	JML BERKURANG	8.982	93	46	5.924	17	61.796	574	458	649	214	59	132	592	6	16.190	21	187	5.160	228	99	929	281	12	630	0	
11	AKTIF	4.666	3	53	4.614	17	53.296	307	525	455	102	67	27	276	4	10.363	10	182	3.972	165	90	695	174	22	586	3	
12	MUTASI DLM PROV.	216	4		213	1	2.242	13	8	21	1			13		154			54	1		13	7		5		
13	PROGRESIF	401			441		3.130	3	2	47																	
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											

Gambar 2.13 Tampilan Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3) Menyalin Laporan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (PBJT-TL)



**Gambar 2.14 Tampilan Laporan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (PBJT-TL).**

## **Pajak Reklame di Kota Surakarta**

Kota Surakarta merupakan sebuah Kota di Jawa Tengah yang memiliki beberapa sumber pendapatan dari berbagai sektor ekonomi, salah satunya adalah pajak reklame. Pajak Reklame di Kota Surakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

## **Alur Pemasangan Reklame**

Pemasangan reklame di Kota Surakarta diatur oleh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan ini mencakup beberapa

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

aspek yang harus dipatuhi wajib pajak terkait dengan perizinan pemasangan reklame, Adapun alur pemasangan reklame sebagai berikut:

1. Perusahaan swasta/*brand* melakukan transaksi bisnis menyewa tempat pemasangan reklame kepada vendor/ biro reklame. Dalam hal ini biasanya pihak *brand* juga mencetak iklan tersebut pada biro reklame, karena kebanyakan biro reklame ini juga memiliki usaha percetakan. Selain itu, terkait pemasangan, izin dan pajak reklame juga diurus langsung oleh pihak biro reklame, yang artinya pihak biro reklame yang bertanggung jawab atas objek reklame sekaligus menjadi wajib pajak reklame.
2. Vendor reklame yaitu selaku wajib pajak reklame, mengajukan permohonan pemasangan reklame ke Bapenda dengan menyerahkan formulir permohonan penyelenggaraan reklame, formulir ini dibuat oleh Bapenda yang berguna untuk mengajukan permohonan penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi semua ketentuan yang timbul atas penyelenggaraan reklame.
3. Setelah wajib pajak melakukan pengajuan pemasangan reklame, Bapenda menerbitkan SKPD atau surat ketetapan pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ketetapan pajak reklame didasarkan oleh pengenaan pajak reklame yaitu sebesar  $25\% \times \text{Nilai sewa reklame/tahun} \times \text{ukuran reklame} \times (\text{waktu pemasangan reklame} + \text{muka reklame})$ . Waktu pemasangan reklame memiliki 2 sifat yaitu permanen dan insidental, permanen memiliki jangka waktu selama satu tahun, sedangkan insidental memiliki jangka waktunya bisa dalam harian

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atau mingguan. Hasil perhitungan tersebut merupakan jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh wajib pajak.

4. Setelah menerbitkan SKPD, Bapenda merekomendasikan perizinan pemasangan reklame tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki wewenang untuk memberi izin pemasangan reklame.
5. Kemudian, Bapenda menyampaikan hasil perizinan pemasangan reklame kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan permohonan tersebut.

## **Pihak atau Aktor terkait Pajak Reklame**

Dalam Pajak Reklame terdapat banyak pihak/aktor yang terlibat dan pihak/ aktor tersebut memiliki kepentingan serta tujuan masing- masing, adapun pihak/aktor yang terlibat dalam pemasangan reklame meliputi:

1. Perusahaan swasta/*brand* sebagai penyewa pemasangan reklame kepada vendor reklame.
2. Vendor/biro reklame sebagai penyedia jasa pemasangan reklame sekaligus sebagai wajib pajak yang mengajukan permohonan pemasangan reklame kepada Bapenda.
3. Bapenda sebagai pihak yang berwenang terhadap perpajakan reklame sekaligus penyalur perizinan pemasangan reklame oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP sebagai pihak yang berwenang memberi izin pemasangan reklame sesuai ketentuan penyelenggaraan reklame.
5. Pemerintah Kota sebagai instansi yang terkait tentang pelaporan pajak reklame.

## Pendataan Pajak Reklame di Kota Surakarta tahun 2020 dan 2023

**Tabel 4. 1 Pendataan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2020 sampai 2023**

Jenis Reklame	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	10.975.628.016	14.533.242.500	16.687.719.000	17.037.464.600
Reklame Kain	2.377.754	851.197.000	1.266.351.000	1.366.900.000
Reklame Melekat/ Stiker	0	4.326.400	0	0
Reklame Selebaran	4.161.070	125.000	3.488.000	0
Reklame Berjalan	17.833.160	1.784.000	42.442.000	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Diolah penulis.

## Pajak Reklame sebagai Sektor Peningkatan Pendapatan Daerah

**Tabel 4. 2 Potensi Pajak Reklame Kota Surakarta**

Uraian	Tahun
--------	-------

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	11.000.000.000	13.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000
<b>Realisasi</b>	12.759.909.730	15.390.674.900	16.583.491.700	18.404.364.600

Sumber: Bapenda Kota Surakarta. Diolah Penulis.

## Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan pajak reklame antara lain:

1. Materi Reklame tentang Iklan Rokok dalam Zona Sekolah
2. Posisi Reklame Zat Adiktif
3. Koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Reklame (ASPRO)
4. Penyelarasan antara Pajak dan Retribusi Reklame
5. Prosedur Penetapan Titik Baru dan Lelang Reklame
6. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pajak Reklame
7. Pendataan Reklame yang Kurang Memadai

## Kesimpulan

Pendapatan daerah dari pajak reklame di Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, dengan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas pengelolaan dan potensi besar yang dimiliki sektor pajak reklame dalam mendukung keuangan daerah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Rekomendasi

Untuk lebih memajukan pajak reklame sebagai sektor peningkatan pendapatan daerah dan memastikan keberhasilan pengelolaannya, berikut adalah beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah serta seluruh aktor terkait:

1. Penegakan Regulasi dan Pengawasan
2. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Aktor terkait
3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
4. Optimalisasi Pendataan dan Pengelolaan Data
5. Prosedur Penetapan Titik Baru dan Lelang Reklame
6. Meningkatkan Kerjasama antar Aktor terkait Pajak Reklame

## Refleksi Diri

Kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara semakin tertanam dalam diri penulis. Penulis menyadari bahwa pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Sebagai salah satu aktor dalam pendataan pajak reklame, penulis belajar bahwa integritas dan transparansi dalam melaksanakan tugas adalah kunci utama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pentingnya mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam pendataan dilakukan dengan jujur dan profesional, menjadi sangat jelas bagi penulis. Dalam menjalankan tugas ini, penulis berkomitmen untuk selalu

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengedepankan etika kerja yang tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda Kota Surakarta. (2021). <https://bapenda.surakarta.go.id/bidang-pendataan/>
- Struktur Organisasi. (2021). Diakses dari [bapenda.surakarta.go.id: https://bapenda.surakarta.go.id/struktur-organisasi/](https://bapenda.surakarta.go.id/struktur-organisasi/)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 35 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Pub. L. No. 41 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198296/perwali-kota-surakarta-no-41-tahun-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (2007). [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Winarno, W. W. (2021). *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi: Sebuah Pengantar*. Wingit Press. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X4siEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=wing+wahyu+winarno+sistem+informasi+manajemen&ots=LBiQD3DJ0t&sig=Tjc5ptg38N966g4ysRVsWfQaOaE&redir\\_esc=y#v=onepage&q=wing%20wahyu%20winarno%20sistem%20informasi%20manajemen&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X4siEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=wing+wahyu+winarno+sistem+informasi+manajemen&ots=LBiQD3DJ0t&sig=Tjc5ptg38N966g4ysRVsWfQaOaE&redir_esc=y#v=onepage&q=wing%20wahyu%20winarno%20sistem%20informasi%20manajemen&f=false)
- Purwanto, Djoko. (2006). *Komunikasi Bisnis*, Edisi Ketiga, Erlangga. Jakarta